



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**

TAHUN ANGGARAN 2024



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.268.202.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.161.057.303.000,00

b. Belanja Daerah sebesar	Rp. 1.268.202.400.000,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan Pembiayaan sebesar	Rp. 107.145.097.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp94.923.259.000,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer Rp1.057.771.604.000,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.362.440.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak daerah Rp57.077.600.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi daerah Rp823.099.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah Rp29.022.560.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat Rp975.286.757.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Transfer antar daerah Rp82.484.847.000,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Hibah Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp7.726.440.000,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pajak Daerah yang di maksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Hotel Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp43.990.250.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Retribusi Daerah yang di maksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp607.766.000,00 (enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp115.333.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di maksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (2) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah yang di maksud pada pasal 3 huruf d bersumber dari:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Jasa Giro Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga Rp3.273.560.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Transfer pemerintah pusat yang sah yang di maksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a bersumber dari:
 - a. Dana Perimbangan Rp922.906.131.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp341.909.016.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan juta enambelas ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp432.069.006.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp83.292.763.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp65.635.346.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - g. Dana Desa Rp52.380.626.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 8

Transfer antar daerah yang di maksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf b bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp82.484.847.000,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang di maksud dalam Pasal 3 angka 3 huruf bersumber dari:

- a. Pendapatan Hibah Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasional Rp894.787.858.974,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Belanja modal Rp250.696.505.126,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
- c. Belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 11

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp492.287.147.411,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa Rp353.898.400.984,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Belanja hibah Rp40.052.059.579,00 (empat puluh miliar lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
- d. Belanja bantuan sosial Rp8.550.251.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah Rp3.253.300.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp48.734.008.236,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp62.282.043.574,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp131.180.285.066,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh enam rupiah); dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp486.902.250,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 13

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 14

Belanja pegawai dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp264.179.792.467,00 (dua ratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp172.614.334.434,00 (seratus tujuh puluh dua miliar enam ratus empatbelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp46.357.025.510,00 (seratus tujuh puluh dua miliar enam ratus empatbelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp6.851.447.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.242.870.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp541.678.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Belanja barang dan jasa dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang Rp74.474.923.922,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- b. Belanja Jasa Rp137.153.808.138,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp14.032.945.731,00 (empatbelas miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp84.261.481.171,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.543.600.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp17.678.680.000,00 (tujuhbelas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp752.962.022,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp19.000.000.000,00 (sembilanbelas miliar rupiah).

Pasal 16

Belanja Hibah dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp18.170.000.000,00 (delapanbelas miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp21.358.626.736,00 (dua puluh satu miliar tiga

- ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); dan
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 17

Belanja Hibah dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.073.651.500,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.032.800.000,00 (dua miliar tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp5.443.799.500,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 18

Belanja Modal dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp3.253.300.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp960.850.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp10.485.431.460,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.561.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp7.576.626.830,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.129.100.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.667.759.016,00 (tigabelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enambelas rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp325.445.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Komputer Rp6.121.134.180,00 (enam miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- i. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
- j. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- k. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp64.661.750,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- l. m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

Belanja modal Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp62.282.043.574,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.698.186.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 21

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp97.909.009.801,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp19.496.235.265,00 (sembilanbelas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- d. Belanja Modal Instalasi Rp11.155.430.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja Modal Jaringan Rp2.619.610.000,00 (dua miliar enam ratus sembilanbelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp76.202.250,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Belanja Modal Biota Perairan Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp72.700.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp61.780.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja Tidak Terduga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp4.707.760.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp725.137.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp115.285.138.900,00 (seratus limabelas miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp107.145.097.000,00 (seratus tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp107.145.097.000,00 (seratus tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III
 - a. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV
 - a. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
 - b. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V
 - a. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI
 - a. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
 - b. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;
 - c. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANSO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 302



LAMPIRAN I



KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.923.259.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	57.077.600.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	600.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	600.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	600.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.050.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	18.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	18.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.300.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.300.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	108.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	21.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	21.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	3.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.800.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.800.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.800.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43.990.250.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	175.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	175.000.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	43.600.000.000,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	43.600.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	5.250.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	5.250.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	210.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	210.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.350.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.350.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.350.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.100.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	823.099.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	607.766.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	450.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.417.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.417.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.349.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	22.349.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	115.333.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	65.333.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	65.333.000,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	50.000.000,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	50.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.022.560.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.265.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.265.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.265.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.273.560.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.273.560.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.273.560.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	84.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	20.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	20.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.057.771.604.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.286.757.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	922.906.131.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	341.909.016.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	50.874.746.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.669.399.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	617.267.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.774.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	147.936.743.480,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	122.683.398.520,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	867.920.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.774.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.219.994.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	432.069.006.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	432.069.006.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.292.763.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	564.525.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.152.652.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.345.526.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.498.820.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.774.520.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.262.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.271.824.000,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.619.021.000,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.681.341.000,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.673.386.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.685.534.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	2.763.614.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.635.346.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.325.180.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	685.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	22.116.866.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.286.200.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.511.901.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.353.020.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	328.910.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.097.302.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	306.601.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.031.860.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.123.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	618.006.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	358.740.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	52.380.626.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	52.380.626.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	52.380.626.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.484.847.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	82.484.847.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	82.484.847.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.567.031.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.961.488.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.399.358.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	40.030.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.516.940.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.362.440.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	636.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	636.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	636.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	636.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.161.057.303.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	894.787.858.974,00
5.1.01	Belanja Pegawai	492.287.147.411,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	264.179.792.467,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	208.071.381.927,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	173.680.885.927,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.390.496.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.306.137.230,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.685.823.230,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.620.314.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.896.807.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.896.807.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.976.101.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.094.079.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	882.022.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.688.603.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.403.865.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.284.738.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.340.635.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.814.419.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.526.216.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.900.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.900.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.480.690,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.764.790,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	715.900,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.461.745.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.679.157.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.782.588.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	323.190.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	242.894.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	80.296.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.065.811.620,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	728.953.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	336.858.620,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	172.614.334.434,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	54.224.333.378,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.117.381.906,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.106.951.472,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	5.309.002.692,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.758.163.732,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	1.550.838.960,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.863.835.498,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.648.612.220,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.215.223.278,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.504.621.420,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.486.938.280,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	17.683.140,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	104.712.541.446,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	94.168.156.988,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	10.544.384.458,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.357.025.510,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.500.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	20.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	22.116.866.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	22.116.866.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.511.901.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.511.901.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.286.200.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.286.200.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.426.551.241,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.426.551.241,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	15.990.617.269,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.594.562.269,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	310.125.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	85.930.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.004.390.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	204.405.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	799.985.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.851.447.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	477.088.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	477.088.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.927.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.927.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.408.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.408.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	39.851.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	39.851.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	692.066.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	692.066.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.609.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.609.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.750.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.750.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.666.443.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.666.443.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	396.900.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	396.900.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.388.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.388.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	156.283.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	43.294.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.032.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.995.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	106.962.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.056.046.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.056.046.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.688.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.688.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.242.870.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.708.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.708.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.123.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.123.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.835.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.835.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.007.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.007.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.275.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.275.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.052.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.052.000,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.867.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.867.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.169.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.169.000,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.406.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.406.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.048.728.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.048.728.000,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	700.000,00
5.1.01.05.12.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	700.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	541.678.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	118.250.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	118.250.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	423.428.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	423.428.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.898.400.984,00
5.1.02.01	Belanja Barang	74.474.923.922,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.352.478.922,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	461.926.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	68.600.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.288.101.487,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	23.015.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	88.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.120.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.741.701.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.821.594.170,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	342.320.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.943.692.575,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.256.902.932,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.591.734.711,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.005.438.076,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	351.392.030,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	571.277.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	765.434.450,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	762.578.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	310.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	222.750.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	931.508.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.777.806.240,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.644.769.448,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.819.493.625,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	213.900.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	144.900.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	44.377.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	75.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.524.145.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.523.814.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	185.020.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	72.101.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	913.278.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	182.590.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.676.203.978,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	198.950.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	79.350.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	212.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	836.500.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	235.780.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.600.335.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	60.120.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	555.200.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	949.260.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	113.000.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	113.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.445.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.320.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	7.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	137.153.808.138,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.445.679.605,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.263.785.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.214.315.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.749.450.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	24.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.920.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	94.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	868.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.037.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.729.485.896,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	83.460.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	952.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	406.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	492.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.111.454.463,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	248.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.296.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.487.335.150,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.846.799.910,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	568.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	792.300.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	114.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	149.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.338.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.310.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	53.360.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	724.787.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.075.560.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	51.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	49.556.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	910.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.058.740.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	779.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	168.060.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.147.698.150,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.050.682.783,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	260.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.934.256.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	894.182.992,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	875.828.098,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.154.352.663,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.921.899.358,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.036.287.840,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.061.290.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	793.816.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.409.385.838,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	272.612.093,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.506.787,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	100.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	204.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	204.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.806.934.755,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	171.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	360.935.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.600.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.090.000,00
5.1.02.02.04.0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.400.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	240.265.000,00
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	95.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.451.354.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.767.644.755,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	364.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.400.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	170.100.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	28.200.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	23.946.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.712.657.430,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	656.476.430,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	307.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	530.850.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	532.386.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	357.224.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	6.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	305.721.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	95.300.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	95.300.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.289.988.070,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	75.041.390,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	151.500.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	188.784.760,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.040.420,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	259.621.500,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	150.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.086.100.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	400.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	276.100.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	210.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	15.000.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.576.248.920,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.766.598.920,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	353.150.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	451.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	5.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.032.945.731,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	60.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	30.000.000,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.624.983.421,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	13.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.314.615.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	870.060.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	55.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.600.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	881.000.000,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	169.174.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.491.388.445,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	175.680.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	323.765.040,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	113.540.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	730.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	182.100.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	113.550.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	52.506.936,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	600.000.000,00
5.1.02.03.02.0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50.004.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.307.033.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.469.216.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	250.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.013.380.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.000.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	27.600.000,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	15.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	45.837.000,00
5.1.02.03.03.0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	25.000.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	222.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	29.000.000,00
5.1.02.03.03.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40.000.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	30.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.025.929.310,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	471.329.310,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	440.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	18.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	86.600.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.05.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.261.481.171,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.223.681.171,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.938.999.614,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.142.849.557,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.099.832.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.000.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	37.800.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	37.800.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.543.600.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.760.900.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.125.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	560.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.389.600.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	682.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.782.700.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.277.700.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	505.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.678.680.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.678.680.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.678.680.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	752.962.022,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	752.962.022,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	752.962.022,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.052.059.579,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.170.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.100.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	70.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	70.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.358.626.736,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.626.741.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.626.741.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.507.885.736,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.945.485.736,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.562.400.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.224.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.224.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.073.651.500,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	455.651.500,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	455.651.500,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	618.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	618.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.032.800.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.952.800.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.952.800.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	80.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.443.799.500,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.443.799.500,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.443.799.500,00
5.2	BELANJA MODAL	250.696.505.126,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.240.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	40.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	700.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	200.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.013.300.000,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	200.000.000,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	600.000.000,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.213.300.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.734.008.236,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	960.850.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	960.850.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	21.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	800.000.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	129.600.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.250.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.485.431.460,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.260.431.460,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.550.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.323.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	667.410.460,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.290.021.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.280.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	225.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	225.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.561.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.561.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	361.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.200.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.576.626.830,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	934.700.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	209.380.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	725.320.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.216.867.030,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.548.810.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.292.528.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.777.629.030,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	579.400.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.425.059.800,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	245.159.800,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	129.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	386.900.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	185.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	15.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	172.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	290.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.129.100.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.994.100.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.633.100.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	209.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	134.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	60.000.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	60.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	75.000.000,00
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	75.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.667.759.016,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.664.029.800,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.358.844.192,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	23.000.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	959.518.668,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.800.000.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.500.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.519.166.940,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.003.729.216,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.003.729.216,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	325.445.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	198.695.000,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	16.920.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	181.775.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.750.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	6.750.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	120.000.000,00
5.2.02.08.05.0003	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	120.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.121.134.180,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.930.409.180,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.897.241.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.033.168.180,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.190.725.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	18.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	668.125.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	45.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	459.600.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	42.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	42.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	42.000.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	3.200.000.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	3.200.000.000,00
5.2.02.17.01.0022	Belanja Modal Heat Generating Equipment	3.200.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.100.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	820.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	820.000.000,00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	280.000.000,00
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	280.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.661.750,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.661.750,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	64.661.750,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.980.229.574,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.282.043.574,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.455.689.574,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.113.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.225.456.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	430.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.456.900.286,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	215.800.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.868.086.564,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	7.578.284.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.455.559.560,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.424.040.400,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	650.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	259.562.764,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	779.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	826.354.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	626.354.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.698.186.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.698.186.000,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	151.200.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.546.986.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.180.285.066,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	97.909.009.801,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.017.809.801,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	53.852.979.501,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	7.465.500.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	32.699.330.300,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.891.200.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.200.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.541.200.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.496.235.265,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.028.500.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	14.798.500.000,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	230.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	179.200.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	179.200.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	516.418.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	116.418.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.772.117.265,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.698.557.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.073.560.265,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	11.155.430.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	995.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	995.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	9.960.430.000,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	9.960.430.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.619.610.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	100.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.519.610.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.519.610.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.902.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	76.202.250,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	76.202.250,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	76.202.250,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	300.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	300.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	38.000.000,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	38.000.000,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	38.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	72.700.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	72.700.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	72.700.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	61.780.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	61.780.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	61.780.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	61.780.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.718.035.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.285.138.900,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	62.904.512.900,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	62.904.512.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.380.626.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	52.380.626.000,00
	Jumlah Belanja	1.268.202.400.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-107.145.097.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.145.097.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.145.097.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	107.145.097.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	63.072.548.500,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	31.536.274.250,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	31.536.274.250,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	44.072.548.500,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	1.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	21.536.274.250,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	21.536.274.250,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	107.145.097.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Natuna, 29 Desember 2023

Bupati



WAN SISWANDI, S. Sos. M. Si